

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 UMKM

2.1.1 Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2.1.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM dapat dikelompokkan menjadi:

1. Usaha Dagang

Usaha dagang merupakan suatu usaha yang kegiatan utamanya membeli produk atau barang dari pemasok (supplier) dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Contohnya:

- a. Keagenan: agen Koran/majalah, sepatu, pakaian, kosmetik.
- b. Pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan.

c. Sektor informal: pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima.

2. Usaha Pertanian dan Perikanan

Usaha pertanian dan perikanan merupakan suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemeliharaan tanaman atau hewan sampai dengan tanaman dan hewan tersebut mendatangkan keuntungan. Contoh:

- a. Perkebunan: pembibitan, sayur-sayuran.
- b. Peternakan: ternak ayam petelur, susu.
- c. Perikanan: tambak udang, kolam ikan.

3. Usaha Industri

Usaha manufaktur merupakan suatu usaha yang kegiatannya mengelola bahan mentah (bahan baku) menjadi produk atau barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Contohnya:

- a. Industri makanan/minuman
- b. Pertambangan
- c. Pengrajin
- d. Konveksi

4. Usaha Jasa

Usaha jasa (*service business*) merupakan suatu usaha yang kegiatannya dilakukan dengan cara memberikan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya:

- a. Jasa konsultan
- b. Jasa advokat
- c. Perbengkelan

- d. Restoran
- e. Jasa konstruksi
- f. Jasa transportasi
- g. Jasa telekomunikasi
- h. Jasa pendidikan
- i. Jasa simpan pinjam

2.1.3 Karakteristik Dasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Karakteristik dasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia berbeda dengan negara lainnya. Jika dinegara lain, UMKM dijadikan sebagai penghubung yang efisien dan handal bagi perusahaan besar, akan tetapi UMKM di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda yang menyebabkan UMKM Indonesia masih kalah bersaing dengan UMKM di negara lain., adapun karakteristik dasar tersebut antara lain:

1. Terdapat kesulitan dalam hal peminjaman modal, terutama pada saat pengajuan kredit dilembaga keuangan formal. Sebagiaian besar lembaga keuangan di Indonesia, mengharuskan UMKM agar membuat Laporan Keuangan sebagai syarat pengajuan kredit.
2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.
3. Keterbatasan teknologi yang mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan suatu entitas masih rendah.
4. Keterbatasan dalam perolehan bahan baku.

5. Lemahnya aspek pemasaran, sehingga suatu entitas kesulitan dalam memasarkan produk yang dihasilkan.
6. Masih lemahnya hubungan kerjasama dengan perusahaan besar.

Tabel 2.1
Karakteristik UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Karakteristiknya

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	1. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti. 2. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun. 4. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 5. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 6. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. 7. Umumnya belum mempunyai akses kepada perbankan, tetapi sebagian besar sudah mempunyai akses kepada lembaga keuangan non bank. 8. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Misalnya, usaha perdagangan seperti kaki lima dan pedagang di pasar.
Usaha Kecil	1. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. 2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah. 3. Umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana. 4. Keuangan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan pribadi. 5. Sudah membuat rencana usaha. 6. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 7. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha. 8. Sebagian besar sudah mempunyai akses ke perbankan untuk keperluan modal.

	9. Sebagian besar belum dapat menjalankan manajemen usaha dengan baik seperti perencanaan bisnis. Misalnya, pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
Usaha Menengah	1. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. 2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi secara teratur sehingga memudahkan untuk melakukan audit dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. 3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. 4. Sudah memiliki persyaratan legalitas. 5. Sudah memiliki akses kepada sumber pendanaan perbankan. 6. Umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
Usaha Besar	1. Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

2.2 Akuntansi dan UMKM

2.2.1 Pengguna Informasi Akuntansi

Adapun dibawah ini para pengguna informasi akuntansi untuk berbagi kepentingan antara lain sebagai berikut (Dwi Martani, 2012)

1. Investor, menilai entitas kemampuan entitas dalam membayar dividen dimasa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli dan menjual saham entitas.
2. Karyawan, kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pension dan kesempatan kerja.

3. Pemberian jaminan, kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman.
4. Pemasok dan kreditur, kemampuan entitas membayar liabilitas pada saat jatuh tempo.
5. Pelanggan, kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya.
6. Pemerintah, menilai bagaimana alokasi sumber daya.
7. Masyarakat, menilai trend dan perkembangan kemakmuran entitas.

2.2.2 Peran Akuntansi Dalam UMKM

Dalam mengelola bisnis UMKM, satu hal yang vital namun juga sering dianggap remeh oleh beberapa orang adalah ilmu akuntansi. Tidak sedikit yang berpikir bahwa menjalankan bisnis dalam skala kecil tidak perlu susah-susah mengatur keuangan karena semua pasti bisa dikontrol. Padahal, walaupun bisnis masih dalam skala kecil, manajemen keuangan adalah hal penting yang tetap harus dipertimbangkan. Pentingnya akuntansi dalam UMKM yang dikelola.

1. Mengetahui Kondisi Bisnis

Dalam ilmu akuntansi untuk bisnis UMKM, dikenal yang namanya laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan ini, bisa melihat berapa besarnya laba atau rugi yang didapatkan. Jika bisnis terus mendapatkan laba maka itu artinya kondisi bisnis dalam keadaan stabil dan sebaliknya,

2. Membantu Proses Peminjaman

Laporan keuangan yang disusun bisa bermanfaat untuk ini. Ketika ingin

mengajukan pinjaman ke bank maupun ke investor, maka mereka biasanya akan meminta laporan keuangan. Dengan laporan keuangan yang diserahkan calon pemberi pinjaman bisa tahu bagaimana kondisi keuangan, apakah sehat atau tidak.

Kondisi keuangan yang stabil bisa membuat calon pemberi pinjaman yakin bahwa ia akan menginvestasikan uangnya pada orang yang tepat. Sebaliknya, jika catatan keuangan buruk maka bank atau investor akan berpikir dua kali sebelum member pinjaman. Mereka tentunya tidak mau jika bisnis bangkrut dan gagal bayar.

3. Mengontrol Keuangan Bisnis

Dengan adanya laporan keuangan, mau tidak mau harus rajin mencatat semua pengeluaran dan pemasukan untuk penyusunan laporan itu sendiri. Dengan begitu bisa diketahui sudah berapa banyak rupiah yang sudah dikeluarkan untuk di bulan berjalan dan hal ini akan membantu mengontrol pengeluaran. Berbeda jika tidak memiliki catatan keuangan, bisa-bisa akan membelanjakan uang secara tidak terkontrol.

4. Menentukan Target Selanjutnya

Salah satu jenis laporan keuangan dalam akuntansi adalah laporan laba-rugi. Laporan laba rugi dapat member tahu seberapa berkembang bisnis yang dikelola. Dari situ bisa diketahui langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Misalnya mengambil sebagian keuntungan untuk memperbanyak alat produksi atau membuka cabang di tempat yang baru. Laporan keuangan membantu untuk mengambil keputusan.

2.2.3 Asumsi Dasar Akuntansi

Akuntansi dalam prakteknya berjalan berdasarkan asumsi-asumsi, dimaksudkan agar dapat lebih mudah diterima atau dilakukan. Adapun asumsi-asumsi dasar yang dipakai dalam dunia akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Usaha Khusus

Perusahaan dipandang sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri, berpisah dengan kekayaan pemilik usaha artinya perusahaan itu dimiliki oleh pemilik, namun harus dipisahkan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan.

2. Kelangsungan Usaha

Perusahaan diharapkan akan terus hidup dan berkembang, tidak terlikuidasi di masa yang akan datang. Penekanan dari konsep ini adalah terhadap anggapan bahwa akan tersedia cukup waktu bagi suatu perusahaan untuk menyelesaikan usaha, kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian.

3. Penggunaan Satuan Moneter

Transaksi yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dinyatakan di dalam catatan dalam bentuk uni moneter pada saat terjadinya transaksi itu. Unit moneter yang digunakan adalah mata uang dari negara di mana perusahaan itu berdiri. Contoh: Indonesia unit moneternya rupiah, Malaysia unit moneternya ringgit.

4. Periode Waktu PelaporanPeriode Waktu Pelaporan

Batas waktu yang diberikan untuk melaporkan laporan keuangan setidaknya tidaknya satu tahun sekali laporan keuangan harus disajikan.

2.3 Sistem Pembayaran Digital

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai perpindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Pembayaran digital adalah pembayaran berbasis teknologi. Di dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek atau kredit sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan *software* tertentu, kartu pembayaran digital antara lain: aplikasi perpindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintahkan kegunaan dari sistem tersebut.

Sistem pembayaran secara digital menyediakan cara pembayaran untuk pembelian barang ataupun jasa melalui internet. Berbeda dengan sistem pembayaran biasanya, pelanggan mengirimkan seluruh data yang berkaitan dengan pembayaran kepada penjual melalui internet, tidak ada interaksi eksternal yang jauh antara pelanggan dan penjual (dengan mengirimkan faktur melalui e-mail atau konfirmasi melalui fax).

2.4 Landasan Quick Response Code Indonesia Standar

Peraturan anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan atas peraturan anggota Dewan Gubernur Nomor

21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

Bank Indonesia telah menetapkan QRIS yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Akseptasi QRIS telah meluas dan digunakan untuk berbagai transaksi pembayaran termasuk transaksi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Terdapat kebutuhan untuk Transaksi QRIS dalam nominal yang lebih besar dari batas nominal yang diatur dalam ketentuan saat ini antara lain transaksi pembayaran tagihan pajak, tagihan listrik, produk artisan, donasi keagamaan, ritel ke distributor, layanan kesehatan, restoran dan pariwisata.

Untuk memperkuat kebijakan QRIS dalam mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien diperlukan penyesuaian batas nominal per Transaksi QRIS dengan tetap mempertimbangkan manajemen risiko. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.

2.4.1 Pengertian QRIS

Menurut Bank Indonesia (2021), Standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* adalah pengertian dari *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). Dengan penyatuan berbagai macam QR dari Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menjadi lebih simple dalam

bentuk satu *QR Code*. Transaksi QRIS dapat digunakan dengan sumber uang atau dana dalam bentuk instrument pembayaran maupun simpanan yang pengguna miliki antara lain kartu debit/kredit, serta *e-money* lainnya.

Quick Respons Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar kode QR untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau *mobile banking*.

2.4.2 Tujuan Sistem Pembayaran QRIS

Tujuan QRIS adalah untuk mengintegrasikan seluruh metode pembayaran non-tunai di wilayah Indonesia. Dengan adanya QRIS memberikan kemudahan bagi pembeli maupun *merchant* regulator, karena seluruh pembayaran nontunai hanya diawasi oleh satu pintu saja, yaitu Bank Indonesia. Dan jika sebelumnya setiap merchant bisa memiliki lebih dari satu QR Code, dengan QRIS kita dapat bertransaksi hanya dengan satu QR Code walaupun jenis pembayaran yang kita gunakan bermacam-macam. Mengusung semangat UNGGUL (Universal, Gampang, Untung dan Langsung), yaitu:

1) Universal

QRIS bersifat inklusif, digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat dan bisa digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik maupun luar negeri.

2) Gampang

Masyarakat bisa bertransaksi dengan mudah dan aman cukup dengan menggunakan smartphone/ponsel.

3) Untung

QRIS menguntungkan pembeli dan penjual karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa digunakan untuk semua aplikasi pembayaran pada ponsel.

4) Langsung

Pembayaran dengan QRIS langsung diproses seketika. Karena prosesnya cepat sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.

2.4.3 Manfaat QRIS

1. Manfaat QRIS bagi pengguna aplikasi pembayaran:

- a. Pembayaran bisa dilakukan dengan cepat dan mudah, karena hanya perlu scan QR.
- b. Tidak perlu lagi membawa uang tunai.
- c. Tidak perlu memikirkan QR siapa yang terpasang.
- d. Transaksi akan terlindungi, karena semua PJSP penyelenggara QRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia.

2. Manfaat QRIS bagi individu atau kelompok penjual (Merchant):

- a. Berpotensi meningkat penjualan.
- b. Meningkatkan branding.
- c. Pembayaran lebih kekinian dan praktis, karena cukup menggunakan satu QRIS.
- d. Mengurangi biaya pengelolaan kas.
- e. Bisa terhindar dari pembayaran uang palsu.

- f. Tidak perlu menyediakan uang kembalian.
- g. Transaksi akan tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat.
- h. Terpisahnya uang untuk usaha dan personal.
- i. Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
- j. Membangun informasi kredit profil, untuk memudahkan memperoleh kredit ke depan.

2.4.4 Jenis Pembayaran Menggunakan QRIS

Pembayaran digital menjadi lebih mudah bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator satu pintu karena telah berstandar. Jenis pembayaran menggunakan QRIS yaitu Merchant Presented Mode (MPM) Statis, Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis, dan Customer Presented Mode (CPM).

Gambar 2.1
Barcode QRIS



1. Logo QRIS dan dengan tulisan QR Code Standar Pembayaran Nasional.
2. Logo GPN
3. Nama Merchant
4. NMID
5. Terminal ID
6. QR Code
7. Slogan “SATU QRIS UNTUK SEMUA”
8. Situs QRIS
9. Dicitak oleh: (Kode NNS)
10. Cara menggunakan pembayaran QRIS

Tabel 2.2
Penjelasan tentang Barcode QRIS

No	Data	Keterangan
1		Batas garis bawah Logo QRIS dengan tulisan QR Code Standar Pembayaran Nasional diposisikan sejajar dengan batas garis bawah Logo GPN. Tinggi Logo QRIS sejajar dengan kepala burung di Logo GPN.
2		Pencantuman Logo GPN mengikuti Pedoman Logo Nasional v1.0 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di bulan Desember 2017.
3	Nama Merchant	Penamaan <i>merchant</i> mengikuti ketentuan Standar Penamaan <i>Merchant</i>.

4	National Merchant Identification (NMID)	Nomor ID <i>merchant</i> yang dikeluarkan oleh PTEN.
5	Terminal ID	Sama dengan Terminal ID yang tercantum di dalam QR Code Tag 62
6	QR Code	Gambar QR Code yang dibuat sesuai dengan Standar Nasional QR Code Indonesia <i>Merchant Presented Mode</i> (QRIS MPM) Ukuran minimum 115x115 pixel (50x50 mm)
7	SATU QRIS UNTUK SEMUA	Slogan QRIS
8	Cek aplikasi penyelenggara di: www.aspi-qris.id	Tautan situs yang berisi informasi penyelenggara QRIS yang sudah mendapatkan ijin Bank Indonesia
9	Dicetak oleh: [Kode NNS <i>Acquirer</i>]	Kode NNS <i>Acquirer</i> merupakan 8 angka yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional (BSN)
10	Versi Cetak	Format [versi QRIS].[dd].[mm].[yy] Contoh: QRIS versi 1.0 dan dicetak pada tanggal 17 Januari 2021 menjadi: Versi cetak 1.0.17.01.21
11	 Cara bayar dengan QRIS: Buka Aplikasi Berlogo QRIS Scan dan Cek Bayar	Cara menggunakan pembayaran QRIS
12	Latar Belakang	Merupakan latar belakang (<i>background</i>) yang menyerupai

		QR Code dengan dua segitiga warna merah yang sama dengan warna merah pada Burung GPN
--	--	--

2.5 UMKM vs QRIS

Tak hanya kemudahan membayar bagi konsumen, tapi juga kemudahan bagi para pelaku UMKM. Dengan menggunakan metode pembayaran QRIS ada banyak manfaat yang didapat pelaku UMKM:

1. Mulai dari penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun, meningkatkan branding; kekinian, mengurangi biaya pengelolaan kas, terhindar dari uang palsu, hingga tidak perlu menyediakan uang kembalian.
2. Transaksi dengan menggunakan QRIS juga akan otomatis tercatat, dan bisa dilihat setiap saat. Sehingga lebih mudah mengontrol keuangan bisnis yang dijalankan. Kemudahan ini juga dapat mencegah kecurangan dari pembukuan transaksi tunai.
3. UMKM jika menggunakan pembayaran metode QRIS, yakni membangun informasi *credit profile* untuk memudahkan memperoleh kredit usaha perbankan ke depannya.

2.6 Teknologi Informasi dalam Sistem Akuntansi

Teknologi informasi diperlukan dalam era ketiga, sehingga sistem akuntansi bisa dijalankan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan

era ketiga untuk mengumpulkan, menganalisis, melaporkan dan menyebarkan informasi tipe baru (Robert Elliot, 1992).

1. Automated Data Capture

Ini adalah keuntungan yang besar yang ditawarkan oleh teknologi informasi, kesempatan untuk merancang interface customer, karyawan, supplier dengan jalan interaksi data yang dicapture secara otomatis.

2. Instantaneous Acces and Processing

Ini merupakan keuntungan dimensi waktu teknologi informasi. Sistem akuntansi era ketiga harus memungkinkan untuk menganalisis dan bereaksi ke data pasar pada waktu yang sesungguhnya atau real time. Data dan analisis harus bisa diakses oleh pengguna atau user segera.

3. Geographical Freedom

Ini merupakan dimensi ruang dari keuntungan teknologi informasi. Sistem akuntansi era ketiga harus ditujukan pada semua aspek perusahaan tanpa mengesampingkan daerah yang terpencil yang berarti bahwa informasi dari manapun dalam perusahaan dapat diakses oleh manajer dengan segera.

4. Fully Versatile Analysis and Reporting

Teknologi informasi memungkinkan sistem akuntansi era ketiga untuk melaksanakan analisis baru dan melaporkan format baru seperti yang dibutuhkan. Manajer perusahaan era ketiga harus mempunyai data yang dilaorkan dalam cara yang diminta, juga jika laporan tidak pernah diminta sebelumnya.

5. Capacity for Additional Data Types

Teknologi informasi memungkinkan manajer untuk menambah informasi baru ke sistem informasi baru tanpa merancang ulang seluruh struktur.

6. Acces to External Data Bases

Teknologi informasi bisa memungkinkan sistem akuntansi era ketiga untuk membuka data base eksternal. Banyak informasi yang dibutuhkan pada sistem akuntansi era ketiga mengenai pesaing dan gambaran pasar lain. Juga informasi akan bisa digunakan dari data base masyarakat dan harus diatur sesuai permintaan manajemen. Teknologi informasi di bidang computer berkembang dengan sangat pesat, mulai dari kemajuan di bidang cost/performance dari computer, arsitekturnya yang dikenal dengan client/server, penampilan yang membuat teknologi informasi semakin mudah digunakan, media penyimpanannya yang berkapasitas lebih besar dan lebih dapat diandalkan, kemajuan di bidang artificial intelligence sampai penampilan secara fisiknya yang semakin kecil dan portable. Secara teknis kemajuan di bidang teknologi informasi sudah tidak diragukan lagi, akan tetapi mampukah perusahaan memanfaatkannya secara optimal, ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan kompleks. Dalam mengimplementasikan teknologi informasi perlu adanya keseimbangan 5 elemen sistem informasi yaitu: hardware, software, sumber daya manusia, data dan fasilitas/prosedur (termasuk strategi). (*Titi Mildawati, 2006*).

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan Penggunaan QRIS:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Katherine Amelia Dyah Sekarsari (2021)	Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) pada merchant di Surakarta.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, merchant yang menggunakan QRIS di Surakarta selama tahun 2020 meningkat. Akan tetapi edukasi para pedagang tentang pemakaian QRIS masih kurang. Masih banyak pedagang yang belum mengerti cara penggunaan QRIS, mempunyai lebih dari satu stiker QRIS dan penempelan stiker QRIS yang disandingkan dengan stiker kode QR dari aplikasi pembayaran lain.
2	Rina Maryanti (2022)	Preferensi Masyarakat Terhadap QRIS sebagai Sarana Teknologi pembayaran digital.	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan QRIS dapat diterima oleh masyarakat sebagai teknologi untuk metode pembayaran non-tunai. QRIS memiliki dampak positif dimasa akan datang dikarenakan masyarakat dapat merasakan manfaat layanan QRIS.

3	Ayu Indriani (2023)	<i>Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Penjualan dan Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Alfamart Talaga Wetan)</i>	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan QRIS di Alfamart berdampak pada laba penjualan Alfamart terbukti dari laporan BAP pada 3 bulan terakhir yakni bulan Mei, Juni dan Juli 2022. Penggunaan metode pembayarab dengan kode QR menyumbang 23-24%. Penggunaan QRIS di Alfamart juga memberikan efek terhadap kepuasan pelanggan Alfamart Talaga Wetan dilihat dari jawaban 8 narasumber yang menyatakan puas mengenai manfaat adanya QRIS di Alfamart.
4	Hutagalung, Nainggolan, Panjaitan (2021)	Analisis Perbandingan Keberhasilan UMKM Sebelum dan Saat Menggunakan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Di Kota Pematangsiantar”	Kuantitatif	Berdasarkan uji Mc Nemar bahwa terdapat pengaruh positif antara penggunaan QRIS terhadap keberhasilan UMKM di Pematangsiantar. Hal ini bias dilihat dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 ($0.001 < 0.05$).

				Artinya jika ada peningkatan penggunaan/kepercayaan atas variable QRIS maka tingkat keberhasilan UMKM juga akan meningkat.
	Dessy Ratna Ardiyanti (2021)	Analisa Kebijakan Penetapan Harga Dan Penerapan Sistem Pembayaran <i>E-Payment</i> Serta Dampaknya Terhadap Penjualan UMKM Pedagang Makanan"	Kualitatif	Penerapan <i>e-payment</i> meningkatkan penetapan harga yang dilakukan oleh mitra UMKM. Penerapan <i>e-payment</i> cukup baik karena metode pembayaran dengan <i>e-payment</i> mempermudah mitra UMKM. Selain itu, dengan adanya penerapan <i>e-payment</i> meningkatkan pendapatan yang diperoleh mitra UMKM.
6.	Putri Maulia	Dampak Penggunaan QRIS Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Kota Medan	Kuantitatif	Menunjukan bahwa Penggunaan Sistem Pembayaran QRIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Kota Medan. Hal ini dapat di artikan bahwa penggunaan system pembayaran QRIS berdampak positif pada peningkatan

				penapatan UMKM Kota Medan.
7.	Mahyuni & Setiawan (2021)	Bagaimana QRIS menarik minat UMKM? Sebuah Model Untuk Memahami Intensi UMKM Menggunakan QRIS	Kualitatif	Pemahaman akan QRIS, persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan QRIS. Semakin baik pemahaman akan QRIS, semakin besar persepsi manfaat, semakin mudah penggunaan QRIS, dan semakin banyak rekomendasi konsumen untuk menggunakan QRIS.

2.8 Kerangka Berpikir

Bank Indonesia telah menetapkan QRIS yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Akseptasi QRIS telah meluas dan digunakan untuk berbagai transaksi pembayaran termasuk transaksi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Terdapat kebutuhan untuk Transaksi QRIS dalam nominal yang lebih besar dari batas nominal yang diatur dalam ketentuan saat ini antara lain transaksi pembayaran tagihan pajal, tagihan listrik, produk artisan, donasi keagamaan, ritel ke distributor, layanan kesehatan, restoran dan pariwisata.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

